

STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) PROVINSI RIAU DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

Oleh : Huriati Azri

Dosen Pembimbing : Agus Susanto, S.I.P., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Stabilitas harga pangan merupakan aspek krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kota Pekanbaru yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori manajemen strategi dari Fred R. David, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau menerapkan berbagai strategi, seperti pelaksanaan operasi pasar murah, sidak pasar dan sidak distributor serta koordinasi dengan distributor dan pedagang, pemantauan harga pangan secara berkala dan berkola. Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi kendala, di antaranya kurangnya sistem pencatatan distribusi pangan yang akurat, gangguan pada jalur distribusi akibat faktor eksternal seperti bencana alam, serta keterbatasan produksi pangan lokal yang menyebabkan ketergantungan pada pasokan dari daerah lain. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas strategi Disperindagkop UKM dalam menjaga stabilitas harga pangan masih perlu ditingkatkan. Dengan strategi yang lebih terintegrasi dan berbasis data yang akurat, diharapkan stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru dapat lebih terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Kata Kunci: *Stabilitas harga pangan, Strategi Pemerintah, Distribusi Pangan, Kota Pekanbaru.*

ABSTRACT

Food price stability is a crucial aspect in maintaining food security and public welfare, especially in Pekanbaru City which has a high dependence on food supplies from outside the region. This study aims to analyze the strategies implemented by the Riau Province Industry,

Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises (SMEs) Service in maintaining food price stability and identifying factors that influence the effectiveness of these strategies.

This study uses a qualitative method with a descriptive qualitative research type. The location of the study was carried out at the Riau Province Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises (SMEs) Service. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis refers to Fred R. David's strategic management theory, which consists of three main stages, namely strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation.

The results of the study indicate that the Riau Province Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises (SMEs) Service has implemented various strategies, such as implementing low-cost market operations, market and distributor inspections, and coordinating with distributors and traders, monitoring food prices periodically and collaboratively. However, the implementation of this strategy still faces obstacles, including the lack of an accurate food distribution recording system, disruptions to distribution channels due to external factors such as natural disasters, and limited local food production that causes dependence on supplies from other regions. The conclusion of this study confirms that the effectiveness of the SMEs Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Disperindagkop) strategy in maintaining food price stability still needs to be improved. With a more integrated strategy based on accurate data, it is hoped that food price stability in Pekanbaru City can be better maintained, so that community welfare can increase.

Keywords: *Food price stability, Government Strategy, Food Distribution, Pekanbaru City.*

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dan komponen dasar terpenting bagi manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi manusia, tidak dapat ditunda dan juga tidak dapat disubsitusikan dengan bahan lain guna untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta sebagai pilar untuk pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik suatu negara yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya.

Pemenuhan kebutuhan bahan pangan telah dijamin oleh Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, pada Bab IV Pasal 12 ayat (2) berbunyi “Pemerintah dan

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah.” Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal maupun distribusi pangan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petani dan masyarakat.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan pangan dan menjadi tantangan serius dalam menjaga ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh penduduk. Pertumbuhan populasi yang cepat memicu permintaan yang lebih besar akan pangan serta meningkatkan tekanan terhadap sistem produksi dan

distribusi pangan. Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,17% dan pada tahun 2023 penduduk Indonesia telah mencapai 278,69 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,13% sedangkan di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 sebanyak 1.007.540 jiwa dan di tahun 2023 mencapai 1.123.348 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2023).

Permasalahan akan ketersediaan pangan masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Pemerintah. Meskipun negara Indonesia dikenal dengan negara agraris, ternyata mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang baik bukanlah sesuatu yang mudah. Menurut Achmad Suryana, tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan ketahanan pangan di setiap daerah yaitu tantangan pada sisi penyediaan pasokan dan pemenuhan kebutuhan. Empat masalah yang harus diatasi pada tantangan di sisi penyediaan pasokan adalah kendala sumber daya alam, pertanian masih didominasi usaha tani skala kecil, dampak perubahan iklim global, dan ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Sedangkan tantangan di sisi pemenuhan kebutuhan ada dua yaitu perubahan selera masyarakat dan konsumsi pangan (Suryana, 2014).

Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis (permanen) yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan ketersediaan pangan dan mengakibatkan ketahanan pangan rendah. Dengan banyaknya masalah tentang stabilitas pangan ini, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan tertentu tentang pangan, salah satunya adalah ekspor dan impor bahan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada Pasal 30 UU Pemberdayaan petani yang diubah dalam

UU Cipta Kerja yang menegaskan bahwa kebutuhan pangan domestik dan Cadangan pangan nasional dapat diperoleh dari impor (Sidik, 2023). Dan juga pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah yang menunjukkan bahwa impor masih diperlukan. Dengan adanya program impor yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dan menstabilkan harga pangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan daerah.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Pangan pada Bab IV Pasal 9 ayat (1) juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pangan lokal di Daerah. Kemudian pada Pasal 21 ayat (1) juga menerangkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai dengan kebutuhan baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkopukm) Provinsi Riau adalah lembaga yang berperan dalam mengatur dan mengembangkan industri dan perdagangan di wilayah Provinsi Riau dan memiliki Tupoksi dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian,

perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Selain itu juga melakukan pengawasan teknis di lapangan untuk memastikan distribusi yang baik, pengendalian harga, dan pencegahan penimbunan atau kelangkaan makanan. Untuk memastikan rantai pasokan bahan pangan berjalan lancar, Disperindagkopukm bekerja sama dengan pedagang, distributor, dan produsen untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Provinsi Riau mengalami inflasi dari komoditas pangan karena kondisi lahan pertanian yang sedikit berbeda, lahan yang ada di Riau merupakan lahan gambut. Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani mengatakan stok pangan di Riau bergantung kepada daerah pemasok bahan tersebut, terutama Provinsi Sumatera Barat. Ia jelaskan, untuk komoditas yang dihasilkan oleh Provinsi Riau yaitu bawang merah baru terpenuhi 0,99% sedangkan beras 25% (Ali imran, 2024).

Bahan pangan pokok memegang peranan penting dalam aspek ekonomi sosial bahkan politik (Prabowo, 2014). Jumlah pangan yang tersedia (ketersediaan pangan) di provinsi Riau masih didominasi dari pasokan pangan (perdagangan pangan), karena produksi pangan daerah baru dapat memenuhi 23-30 persen total kebutuhan pangan penduduk. Jumlah pangan yang tersedia seperti beras, telur, buah-buahan dan sayuran di Provinsi Riau didominasi oleh pasokan dari luar daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Selatan, dan perdagangan antar pulau. Keterbatasan pangan mengakibatkan harga pangan sangat fluktuatif dan menyumbang inflasi cukup tinggi (Anggoro, 2021). Fluktuasi harga pangan dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pengaruh dari jumlah stok yang stabil, tidak

kekurangan hasil produksi, memaksimalkan fungsi pasar dan biaya transaksi, stabilitas sistem pemerintah atau politik dan juga harga internasional karena dapat mempengaruhi harga dalam negeri terutama untuk komoditas pangan impor. (Ariestiyanti, 2020)

Produksi pangan Riau seringkali tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dan juga memiliki tantangan geografis yang cukup signifikan, termasuk di wilayah yang terpencil dan aksesibilitas yang terbatas. Terdapat 3 daerah yang menjadi penghasil produksi beras terbesar diantaranya Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Siak. Produksi beras sepanjang Januari hingga Desember 2023 setara dengan 118,21 ribu ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 4,35 ribu ton (3,55 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 122,56 ribu ton. Dengan kata lain, kebutuhan konsumsi beras belum dapat dipenuhi produksi yang dihasilkan petani Riau, sehingga untuk memenuhinya dipasok dari daerah lain.

Fluktuasi harga pangan di Kota Pekanbaru menjadi salah satu isu krusial yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta kestabilan perekonomian daerah. Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, memiliki populasi yang terus meningkat, sementara produksi pangan lokal masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan dari luar daerah, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi, keterbatasan stok, serta perubahan permintaan yang dapat memicu ketidakstabilan harga.

Oleh karena itu, peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan. Disperindag melakukan perencanaan,

pengorganisasian dan memastikan pelaksanaan yang mencakup penilaian kebutuhan pangan, analisis sumber daya dan pengembangan strategi untuk impor pangan termasuk mekanisme distribusi yang efisien dan efektif. Disperindag memastikan pelaksanaan proses impor berjalan dengan rencana, mulai dari pemesanan, pengangkutan hingga pendistribusian kepada masyarakat. Dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi berkala guna untuk memastikan program impor berjalan sesuai dengan rencana.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau tahun 2019-2024 memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023. Hal ini mencakup pada perancang strategi makro, koordinasi lintas wilayah dan kebijakan mengenai pengaturan distribusi pangan antar wilayah, serta pembinaan teknis terhadap perangkat daerah ditingkat Kota/ Kabupaten. Sedangkan, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekanbaru memiliki peran yang bersifat implementatif dan pelaksana kebijakan dititik distribusi akhir guna untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Sinergi antara keduanya menjadi factor penting dalam menciptakan stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023.

Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang peranannya sangat strategis. Distribusi pangan ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata di setiap lokasi berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan masyarakat (Ruauw, 2015). Gangguan pada distribusi pangan berdampak terhadap kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap rendahnya akses

pangan masyarakat karena daya beli bahan pangan menjadi menurun.

Distribusi pangan secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan yang berkelanjutan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pasokan dan harga serta melemahkan upaya ketahanan pangan lokal. Ketidakstabilan harga pangan menjadi masalah serius yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang bergantung pada ekspor pangan. Yang mana salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya bencana alam di daerah produsen atau pengeksport pangan. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau badai tropis sering kali mengganggu produksi pertanian dan infrastruktur logistik, menyebabkan penurunan drastis dalam pasokan pangan. Dampaknya tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan di tingkat lokal, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut harga di pasar global karena ketidakpastian pasokan dari daerah-daerah yang terpengaruh. Hal ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang merugikan bagi produsen, pedagang, dan konsumen di seluruh daerah. Untuk mewujudkan sistem distribusi pangan yang efisien, maka diperlukan kebijakan distribusi yang mampu mengatur setiap komoditas atau barang, agar dapat menjangkau seluruh wilayah dan golongan masyarakat (Suryana, 2014).

Ketidaktersediaan data yang akurat dan terperinci mengenai jumlah impor pangan oleh Disperindagkopukm menjadi kendala dalam pengelolaan kebijakan perdagangan pangan. Lemahnya pengawasan mengakibatkan banyaknya pemasok bahan pangan yang langsung ke pasar dan tidak tercatat oleh Disperindagkopukm. Keterbatasan informasi ini mempengaruhi kestabilan pasokan pangan domestik, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar dan

konsumen. Dalam konteks globalisasi perdagangan informasi yang akurat dan tepat waktu terhadap volume dan jenis pangan yang diimpor menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi, serta dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Kondisi tersebut sangat berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan Pemerintah Daerah.

Tentunya hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Karena melihat kondisi tersebut perlu keberkelanjutan upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau terutama di Kota Pekanbaru pada tahun 2023 yang mana fluktuasi harga pangan yang tinggi dibeberepa komoditas akibat gangguan pada jalur distribusi maupun bencana alam di daerah asal komoditas. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “*Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga Pangan di Kota Pekanbaru Tahun 2023*”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada fenomena masalah pada latar belakang diatas maka rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru Tahun 2023?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka

tujuan yang menjadi sasaran penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga Pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan kecenderungan menggunakan analisis. Proses penelitian dan makna lebih diutamakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala serta peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sehingga menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan riset terhadap kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial ataupun hubungan kekerabatan.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk melakukan riset terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, atau suatu kondisi maupun sistem pemikiran dan fenomena yang terjadi pada masa

sekarang dengan maksud membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ditemui di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperidagkopukm) Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau tahun 2023

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta data dukung dari artikel berita dan sosial media. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023 serta faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui kajian teori manajemen strategi oleh Fred R David (2011) dalam buku Konsep Manajemen Strategis, meliputi:

1. Perumusan strategi
2. Penerapan strategi
3. Penilaian strategi

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut

dalam rangka menyediakan nilai pelayanan (*customer value*) terbaik.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki visi bersama seluruh unit di dalam organisasi, yaitu **“Terwujudnya Tata Niaga, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Yang Sehat Dan Mandiri Serta Mempunyai Daya Saing”**. Sedangkan misi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan upaya untuk mencapai visi tersebut. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi-misi sebagai berikut:

1. Memberdayakan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di provinsi riau yang berkualitas, mempunyai daya saing dan berkelanjutan di Provinsi Riau.
2. Mewujudkan tata niaga/perdagangan dalam dan luar negeri yang berkualitas, mempunyai daya saing dan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Pernyataan visi dan misi yang jelas sangat penting untuk menerapkan tujuan dan merumuskan strategi terkhusus untuk menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau. Untuk mencapainya diperlukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang terarah, terukur dan tertuang dalam Rencana Kerja (Renja).

Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing perdagangan dengan strategi:

peningkatan ketersediaan bahan pokok dan penting lainnya, peningkatan akses pasar, barang dan jasa dan peningkatan perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan perumusan strategi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau melakukan analisis mendalam dengan menggunakan Teknik analisis SWOT untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat menjaga stabilitas harga pangan, selain itu juga untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal. Proses ini meliputi identifikasi:

1. *Strengths* (Kekuatan)
2. *Weakness* (Kelemahan)
3. *Opportunities* (Penyusunan strategi)
4. *Threats* (Penanganan ancaman)

Dengan melakukan pendekatan sistematis ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat memahami factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan merancang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan pemahaman komperenshif terkait situasi yang ada serta pengambilan kebijakan yang lebih baik.

2. Penerapan Strategi

Penerapan strategi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga pangan melibatkan beberapa langkah penting. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau khususnya Bidang Perdagangan terus melakukan *collaboration* dengan berbagai pihak terkait, guna untuk menjaga stabilitas

pasokan dan harga pangan. Langkah ini diambil untuk memastikan agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan baik, terutama pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) ataupun libur panjang akhir tahun.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau bertanggung jawab untuk terus mendorong langkah stabilisasi harga guna menjaga kemampuan daya beli masyarakat khususnya terhadap barang kebutuhan pokok pangan yang seringkali berfluktuatif. Dalam upaya untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat guna pemenuhan kebutuhan pokoknya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau mencanangkan startegi kebijakan dengan menggunakan kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau bidang perdagangan terus berupaya untuk memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan melalui empat strategi. Yang bertujuan untuk meningkatkan pengamanan produksi, efesiensi rantai pasokan pangan maupun menjaga stabilitas harga pangan. Adapun 4 strateginya yaitu :

1. Operasi Pasar Murah
Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau untuk keterjangkauan harga yakni melakukan operasi pasar murah yang juga merupakan salah satu strategi dalam upaya penanganan dampak inflasi. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya pasar murah yaitu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi keperluan terhadap bahan pokok pangan dengan harga terjangkau, pengendalian harga dan mempengaruhi harga pasar supaya pedagang menjual

berpedoman pada ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)/ Harga Acuan. Kegiatan ini berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada lampiran Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota point DD Pembagian urusan Bidang Perdagangan nomor (3) sub urusan Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bahwa Pemerintah Daerah Provinsi bertugas menjamin ketersediaan barang.



Berdasarkan gambar diatas, Dinas Perindustrian, Peradagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau sepanjang tahun 2023 telah melaksanakan Operasi Pasar Murah sebanyak 33 kali di beberapa lokasi yang berbeda. Kegiatan operasi pasar murah cenderung dilakukan sebelum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) karena momen tersebut seringkali diikuti oleh peningkatan permintaan terhadap bahan pangan yang dapat menyebabkan lonjakan harga.

Dapat dilihat dari gambar 3.1 diatas, Kota Pekanbaru lebih banyak dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah yaitu sebanyak 29 kali dengan rata-rata pelaksanaan 2 hingga 3 kali dalam setiap bulannya. Kota Pekanbaru lebih sering melaksanakan operasi pasar murah dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya yang ada di Provinsi Riau. Adapun factor yang mempengaruhi yaitu Pertama, Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi yang

memiliki populasi penduduk yang lebih padat dibandingkan daerah lainnya sehingga kebutuhan akan barang pokok lebih tinggi. Kedua, aksesibilitas dan infrastruktur yang lebih baik mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan ini. Ketiga, dikarenakan Kota Pekanbaru tidak memiliki potensi pangan produksi lokal yang mencukupi, sehingga pemenuhannya sangat bergantung pada distribusi pangan dari daerah pemasok.

Operasi pasar murah dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru secara berkala. Lokasi pelaksanaannya berada di halaman kantor camat disetiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Masyarakat menunjukkan antusias yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM). Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dengan menyediakan berbagai komoditas penting, seperti gula, beras, minyak goreng dan cabai dengan harga dibawah harga pasar.

2. Sidak Pasar

Sidak pasar merupakan kegiatan mendadak yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Peradagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau guna untuk memantau ketersediaan, kualitas, dan harga bahan kebutuhan pokok di pasar. Tujuan utama dari sidak ini adalah untuk memastikan bahwa harga barang tetap stabil, mencegah penimbunan, mengawasi kualitas pangan, mengecek tanggal kadaluwarsa dan melindungi konsumen dari praktik curang atau spekulasi harga yang merugikan konsumen. Kegiatan ini rutin dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan (HBKN) ataupun disaat harga bahan pokok melonjak naik. Dengan demikian sidak pasar menjadi Langkah strategis Dinas Perindustrian, Peradagangan, Koperasi dan

UKM Provinsi Riau bagian perdagangan untuk menjaga stabilitas harga pangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sidak pasar yang berlangsung di Kota Pekanbaru terdapat di beberapa pasar, seperti Pasar bawah, Pasar pagi arengka dan pasar cik puan serta pasar-pasar yang menjadi pantauan oleh Disperindag Prov. Riau. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Bersama tim gabungan melakukan inspeksi mendadak pasar (sidak pasar) untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok yang stabil. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar dan aman.

3. Sidak Distributor

Sidak distributor adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang bertujuan untuk memantau ketersediaan dan kualitas bahan pangan yang akan didistribusikan ke pasar. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang disuplai kepasar telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah praktik penimbunan dan kecurangan yang dapat merugikan konsumen (masyarakat).

Sidak distributor sering dilakukan menjelang hari besar keagamaan (HBKN) atau saat terjadi lonjakan harga dipasar. Beberapa tempat yang menjadi lokasi kegiatan sidak distributor adalah Pergudangan Bulog Divre Riau, Lotte Mart Pekanbaru, Pergudangan Angkasa II dan Pasar Induk Akap. Dalam sidak tersebut, tim gabungan memeriksa ketersediaan dan harga bahan pokok serta memastikan tidak adanya penimbunan dan spekulasi harga. Hasil sidak menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan pokok di beberapa Lokasi tersebut masih cukup aman, dan harga bahan

pokok juga masih relatif stabil. Sidak distributor yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau bersama *stakeholder* pada Tahun 2023 terhadap beberapa Pergudangan/perusahaan distributor produk makanan dan sembako maupun pada Pasar Induk Akap yang menjadi peredaran seluruh komoditas pangan yang masuk ke Provinsi Riau dan nantinya akan disalurkan ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Selain itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau melakukan pengawasan terhadap stabilitas harga dan jumlah pasokan pangan yang tersedia di Provinsi Riau.

4. Kolaborasi dengan Instansi terkait

Untuk menjaga stabilitas harga pangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi terkait. Kerja sama ini meliputi koordinasi dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau, Bulog, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan instansi terkait lainnya dalam pemantauan pasokan dan distribusi pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau disaat harga melonjak naik.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah diperlukan adanya kerjasama berbagai aktor maupun organisasi yang terkait dengan kebijakan yang sedang dijalankan. Dalam artian, Pemerintah dituntut agar mampu membangun jaringan kerja sama antar aktor (antarorganisasi/interorganizational) untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan atau program. Selain itu, kerja sama antar daerah menjadi bagian yang vital bagi pemenuhan bahan pangan mengingat daerah Provinsi Riau bukan

daerah sebagai penghasil bahan pangan. Saat ini, Provinsi Riau masih menjalin kerja sama dengan beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Aceh, Jambi dan beberapa daerah penghasil bahan pangan lainnya.

Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Provinsi Riau dan Provinsi tetangga bertujuan untuk memastikan pemenuhan dan distribusi pangan yang berkelanjutan dan aman bagi masyarakat. Kerja sama ini mencakup pengaturan pasokan bahan pokok, peningkatan aksesibilitas pangan, serta pengembangan infrastruktur distribusi yang efisien. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan regional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua Provinsi.

3. Penilaian Strategi

Dalam penilaian strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau melakukan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan sumber daya. Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Rencana Strategis) harus mencakup pada pencapaian kinerja yang terukur dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penilaian strategi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dipantau oleh Inspektorat untuk menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang dilaksanakan. Pemantauan langsung oleh Inspektorat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi dan mengendalikan harga

pangan agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu juga memiliki peran penting dalam pengendalian stabilitas harga pangan melalui operasi pasar murah, pengawasan harga melalui sidak pasar dan sidak distributor, serta meningkatkan kerjasama antar daerah penghasil pangan untuk memastikan pasokan tetap aman.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023

1. Jalur distribusi pangan yang terputus

Jalur distribusi yang terputus menjadi salah satu faktor krusial yang dapat mempengaruhi stabilitas harga pangan. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan pasokan dan fluktuasi harga yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya menghambat aliran pasokan dari daerah penghasil ke pasar, tetapi juga menyebabkan kelangkaan komoditas pangan yang berujung pada lonjakan harga.

2. Bencana alam di wilayah produksi pangan

Bencana alam di wilayah produksi pangan secara signifikan dapat mempengaruhi stabilitas harga pangan di daerah pengimpor. Kerusakan infrastruktur dan penurunan hasil panen akibat bencana mengakibatkan pasokan yang terbatas, sehingga dapat memicu lonjakan harga di pasar. Tentunya hal ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga dapat meningkatkan beban ekonomi masyarakat, diperlukannya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak bencana untuk menjaga ketahanan pangan di daerah Provinsi Riau.

3. Tidak terdata jumlah pangan yang masuk

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengalami kesulitan terhadap

ketidaktersediaan data mengenai jumlah pangan yang masuk ke Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas harga pangan karena dapat mengakibatkan kesulitan dalam perencanaan dan pengelolaan pasokan pangan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh pangan yang masuk ke Provinsi Riau terkhusus di Kota Pekanbaru terjadi pada dini hari, sehingga sulit untuk melakukan pendataan. Selain itu, barang pangan pokok yang masuk langsung didistribusikan kepada masyarakat. Seperti yang terjadi di pasar pagi arengka, distributor pangan yang berasal dari Sumatera barat langsung mengecerkan barang pangan dagangannya kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru Tahun 2023, maka peneliti menarik kesimpulan, yaitu:

Pertama, Pemerintah Daerah terkhususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru. Strategi yang diterapkan oleh dinas ini mencakup tiga tahap utama, yaitu:

1. Perumusan strategi: Melalui analisis SWOT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan produksi lokal dan ketergantungan pada pasokan dari luar

daerah menjadi perhatian utama dalam proses ini.

2. Implementasi strategi: Upaya yang dilakukan meliputi program operasi pasar murah, koordinasi dengan pemasok dan distributor, optimalisasi jalur distribusi serta pengawasan harga pangan di pasar. Namun, implementasi ini masih menghadapi hambatan dalam bentuk keterbatasan data, sistem distribusi yang belum sepenuhnya terstruktur, serta faktor eksternal seperti bencana alam yang mengganggu pasokan pangan.
3. Evaluasi dan penyesuaian strategi: Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang diterapkan. Salah satu perbaikan yang perlu dilakukan adalah penguatan sistem pencatatan dan pemantauan distribusi pangan agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan yang lebih efektif.

Kedua, pada pelaksanaan strategi ini menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pencatatan dan pengelolaan data pangan yang masuk. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sistem pencatatan yang akurat, terutama karena proses distribusi pangan sering dilakukan pada waktu dini hari tanpa pengawasan yang memadai. Lalu gangguan pada jalur distribusi pangan dan bencana alam pada wilayah produsen pangan juga memberikan pengaruh terhadap kestabilan harga di Kota Pekanbaru tahun 2023. Oleh karena itu, dengan pengimplementasian strategi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dapat menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa

- Creative.
- Andi Amran Sulaiman, dkk (2018). *Jurus Stabilisasi Harga Pangan Ala Kabinet Jokowi-JK*. CV. Iaard Press.
- Ali imran. (2024). *Pasokan pangan riau bergantung provinsi tetangga, masyarakat pilih tanam kelapa sawit*. Sabangmerauke. <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/18197/pertanian-di-rohil-cukup-membantu-permasalahan-pangan-di-riau.html>
- Anggoro. (2021). *Gubernur paparkan strategi atasi defisit beras di Riau*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/1998269/gubernur-paparkan-strategi-atasi-defisit-beras-di-riau>
- Ariani, M., & Hermanto. (2013). *Dinamika Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia. Panel Petani Nasional: Rekonstruksi Agenda Peningkatan 122 Kesejahteraan Petani*, 18, i.
- Ariestiyanti, D. (2020). *Revitalisasi Pasar dan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan*. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 14, 2. <https://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/440>
- Badan Pangan Nasional. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan 2022. Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dampak Stabilisasi Harga Bahan Pangan terhadap Inflasi 2014. (2014). *Badan Kebijakan Perdagangan (BKPERDAG), II, Nomor*(Warta Pengkajian Perdagangan). <https://bkperdag.kemendag.go.id/>
- David, F. R. (2011). *Manajemen Strategis Konsep*. Salemba Empat.
- Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau. (2023)
- Efri Novianto. (2019). *Manajemen Strategis*. CV Budi Utama.
- Erwin Haryono. (2022). *Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional Siaran Pers*. Departemen Komunikasi. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2422122.aspx
- Farida, N. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Solo: Cakra Books, 1(1).
- Firdilla Kurnia. (2023). *Strategi adalah : Pengertian, Tujuan, dan contohnya*. *Dailysocial*. dailiysocial.id
- Hermanto. (2013). *Pengembangan Cadangan Pangan Nasional Dalam Rangka Kemandirian Pangan*. *Forum Penelitian Argo Ekonomi*. <https://media.neliti.com/media/publications/69507-ID-pengembangan-cadangan-pangan-nasional-da.pdf>

- LKJIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2023.
- Nasional, B. P. (2024). Gerakan Pangan Murah (GPM), Instrumen Stabilisasi dan Pengendalian Inflasi Pangan. *Badan Pangan Nasional*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/gerakan-pangan-murah-gpm-instrumen-stabilisasi-dan-pengendalian-inflasi-pangan>
- Nawawi H Hadar. (2017). *Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Gadjah Mada University Press.
- Nunik Lestari Dewi. (2012). Manajemen strategis dan proses implementasinya pada Pemerintah Daerah. *Universitas Kristen Marantha*.
- Nursapiah. (2020). *Penelitian Kualitatif*.
- Prabowo, D. W. (2014). Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 8(2), 163–182. <https://doi.org/10.30908/bilp.v8i2.81>
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau.
- RACO, J. R. (2010). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Equilibrium* (Vol. 5, Issue January). CV. Harfa Creative.
- Rachman, H. P. S. 2005. Metode Analisis Harga Pangan. Disampaikan pada Apresiasi Sistem Distribusi dan Harga Pangan oleh Badan Ketahanan Pangan di Pusat Manajemen Pengembangan SDM Pertanian.
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
- Reza, I. (2017). Studi deskriptif tentang kinerja perum bulog dalam pengadaan dan penyaluran beras untuk mendukung stabilisasi pangan. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(1), 1–14.
- Ruauw, E. (2015). Kajian Distribusi Pangan Pokok Beras Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Agri-Sosioekonomi*, 11(1), 58. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.11.1.2015.7342>
- Sidik, R. M. (2023). Kebijakan Impor Pangan Era Jokowi Menghambat Kedaulatan Pangan. *Indonesia for Global Justice*.

<https://igj.or.id/2023/10/13/kebijakan-impor-pangan-era-jokowi-menghambat-kedaulatan-pangan/>

Suryana, A. (2014). *Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025 : Tantangan Dan Penanganannya Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025 : Challenges And Its Responses*. 123–135.

Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). *Serupa. id*, 1-1.

Thompson dan A.J. Strickland, *Strategic Management*, edisi ke-10 (New York: McGraw-Hill, 2001)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Willa wahyuni. (2022). Kebijakan stabilisasi harga pangan. *Hukum Online*. hukumonline.com

Sumber Lainnya :

DisperindagkopUKM (2023). Disperindag Riau pastikan Harga dan Ketersediaan Bapok Stabil. Diakses melalui <https://ppid.riau.go.id/berita/7154/index.html> pada tahun 2025.

Mediacenter Riau (2023). Ketersediaan Bahan Pokok di Distributor Aman

Hingga Pasca Lebaran. Diakses melalui <https://mediacenter.riau.go.id/read/84827/ketersediaan-bahan-pokok-di-distributor-aman.html> pada tahun 2025.

Mediacenter Riau (2023). Jaga Pasokan Pangan, TPID dan OPD Riau Komitmen tekan Inflasi. Diakses melalui <https://mediacenter.riau.go.id/read/82278/jaga-pasokan-pangan-tpid-dan-opd-riau-komitme.html> pada tahun 2025.

Mediacenter Riau (2023). Pemprov Riau siaga jaga Stabilitas Harga Pangan saat Nataru. Diakses melalui <https://mediacenter.riau.go.id/read/89221/pemprov-riau-siaga-jaga-stabilitas-harga-pang.html> pada tahun 2025.

Radio Republik Indonesia (2023). Pasar Murah Pemprov Riau diserbu warga Pekanbaru. Diakses melalui <https://www.rri.co.id/daerah/496303/pasar-murah-pemprov-riau-diserbu-warga-pekanbaru> pada tahun 2025.

Cakplah (2023). Pasar murah dan Bazar Minyak Goreng di Pekanbaru diserbu Masyarakat. Diakses melalui <https://www.cakplah.com/berita/baca/97368/2023/04/09/pasar-murah-dan-bazar-minyak-goreng-di-pekanbaru-diserbu-masyarakat> pada tahun 2025.